

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang menguraikan tentang Kendala dalam Pengajuan Spp-Gu Pada Bidang Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat bisa ditarik simpulan antara lain:

1. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pngeluaran untuk mengganti uang persediaan,dengan metode pembayaran non tunai dimana pembayaran belanja melalui transfer dari rekening bendahara pengeluaran dinas ke rekening penyedia/ penerima/ rekanan bersangkutan.
2. Mekanisme pengajuan SPP-GU (Ganti Uang) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
3. Meskipun SOP dan Mekanisme pada bidang penganggaran sudah sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi masih ada beberapa kelemahan, yaitu: (1) masih kurangnya kelengkapan dokumen pada saat penyampaian pertanggung jawaban (SPJ); (2) masih kurangnya staf ahli pada bidangnya,yang dapat menghambat proses penganggaran karna tidak mengerti penggunaan perangkat lunak; (3) kendala pada sistem dan jaringan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi; (4) proses persetujuan

anggaran yang terhambat akibat kepala dinas sebagai pemimpin untuk persetujuan dokumen-dokumen yang telah disiapkan.

4. Dalam penanganan kendala yang terjadi saat proses penganggaran pada SPP-GU Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya agar kendala tersebut dapat dihilangkan dengan cara: (1) Pengecekan kepada setiap bidan dan meminta agar setiap bidang tidak lalai dalam penyimpanan dokumen penting yang bersangkutan dengan instansi; (2) Melakukan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi kepada satuan kerja agar dapat bekerja dengan optimal pada bidang-bidang yang dijalani; (3) Melakukan cek berkala dan perbaikan pada jaringan sistem agar tidak terjadi gangguan pada sistem; (4) Pelimpahan tanggung jawab kepada sekretaris dengan persetujuan kepala dinas saat kepala dinas tidak berada di tempat

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan dari bab diatas dan telah ditarik kesimpulan, maka saran yang penulis berikan. Yaitu:

1. Dalam menjalankan tugas pokok masing-masing pada seluruh sistem organisasi, sebaiknya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berkomitmen pada bidang atau pekerjaan yang diberikan untuk dijalankan dengan benar agar kesalahan dan keterlambatan tidak terjadi dalam pengoperasian tugas pokok tersebut.

2. Melakukan evaluasi dan pengecekan berkala setiap bulanya pada bidang-bidang serta kawasan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat agar pengoptimalan pencapaian visi dan misi tercapai.
3. Pada bagian sub-keuangan agar menyusun dan merapikan berkas dan dokumen penting agar tidak hilang atau tercecer, sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam proses penganggaran.



